

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

## Strategi Pengembangan *Science Techno Park* (STP): Perbandingan Beberapa STP Pemerintah Daerah di Indonesia

Siti Widharetno Mursalim <sup>a\*</sup>, Witri Cahyati <sup>b</sup>  
dan Assyfa Rizka Awalia <sup>c</sup>

<sup>a</sup> Politeknik STIA LAN Bandung\*

<sup>b</sup> Universitas Sangga Buana YPKP

<sup>c</sup> Institut Manajemen Koperasi Indonesia

e-mail : a [sitiwidharetno.mursalim@gmail.com](mailto:sitiwidharetno.mursalim@gmail.com), b [witri.cahyati@gmail.com](mailto:witri.cahyati@gmail.com),

c [rawaliaassyfa@gmail.com](mailto:rawaliaassyfa@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan STP khususnya STP yang dikelola oleh pemerintah daerah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif karena akan mengungkap strategi pengembangan STP yang dikelola pemerintah daerah di Indonesia. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Pengembangan STP yang dikelola pemerintah daerah pada dasarnya memiliki potensi dan manfaat yang besar bagi pengembangan inovasi di daerah. Tetapi rata-rata masih mencari bentuk terhadap proses pengelolaan dan pengembangan STP. Jadi yang dibutuhkan STP yang dikelola oleh pemerintah daerah tersebut adalah strategi pengembangan yang mengacu pada mekanisme kelembagaan, keuangan dan kerjasama yang jelas dan terintegrasi. Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan secara *Pentahelix* perlu diungkapkan secara jelas serta mekanisme regulasi yang terkoordinasi antara kepentingan publik dan bisnis.

**Kata Kunci:** Science Techno Park, Strategi Pengembangan, Kolaborasi, Indonesia.

## *Science Techno Park* (STP) Development Strategy: Comparison of Several STPs of Local Governments in Indonesia

### Abstract

This study aims to formulate a strategy for developing STPs, especially STPs managed by local governments. The method used is by using a qualitative approach because it will reveal the development of STP strategies managed by local governments in Indonesia. From this research, it can be seen that the development of STPs managed by local governments basically has great potential and benefits for the development of innovation in the regions. However, on average they are still looking for a form for the STP management and development process. So what is needed for STPs managed by local governments is the development of strategies that refer to clear and integrated institutional, financial and cooperation mechanisms. In addition, the involvement of *Pentahelix* stakeholders requires a clear and coordinated regulatory mechanism between public and business interests.

**Keywords:** Science Techno Park, Development Strategy, Collaboration, Indonesia.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

## A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya persoalan yang dihadapi Indonesia bertumpu pada rendahnya hasil riset dan teknologi yang diadopsi oleh industri. Hal ini disebabkan oleh ketidakpaduan antara kebutuhan dan teknologi yang dikembangkan sehingga banyak yang tidak dapat di adopsi oleh masyarakat (Sujarwo, 2012). Menjembatani permasalahan tersebut maka pemerintah dalam Nawa Cita ke 6 (enam), membangun sejumlah science dan techno park skala nasional, politeknik dan SMK dengan prasarana dan sarana serta teknologi terkini (International Association of Science Parks, 2015)

Pengembangan STP di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dilanjutkan oleh Undang-undang No. 106 tahun 2017 tentang KST. Undang-undang ini mendorong pihak-pihak diantaranya pemerintah untuk membangun kawasan sebagai sarana dan prasarana pengembangan dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (Wibowo, 2017). Pembangunan STP berupaya untuk memadukan hasil riset dan teknologi untuk dapat diadopsi oleh industri dan dapat digunakan oleh masyarakat. Penguatan STP dilatarbelakangi juga oleh Skor *Global Innovation Index* (GII) tahun 2021 adalah 27.1 (peringkat 87 dari 126 negara) yang mengalami penurunan dua tingkat dari dua tahun sebelumnya (Rosa, 2022).

STP merupakan kawasan yang diperuntukan bagi penelitian dan pengembangan sains dan teknologi yang dikelola secara profesional melalui penciptaan dan peningkatan ekosistem yang mendukung inovasi untuk meningkatkan daya saing industri/institusi yang berada dalam naungannya juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Ciri utama STP adalah adanya transfer teknologi dan komersialisasi produk inovasi (Sari & Retnaningsih, 2020). Tujuan STP untuk mengelola arus pengetahuan dan teknologi di universitas, lembaga litbang dan industri yang berada dilingkungannya, memfasilitasi penciptaan dan pertumbuhan perusahaan berbasis inovasi melalui

inkubasi bisnis, spin-off, penyediaan ruang dan fasilitas pendukung lainnya (Soenarso et al., 2013).

Pembangunan STP yang cukup massiv di Indonesia termasuk pembangunan STP yang dikelola pemerintah daerah, jangan sampai hanya berhenti dan menjadi tren setiap daerah untuk memiliki STP, namun diperlukan penguatan kualitas terlebih pada STP pemerintah daerah yang telah terbentuk. Sampai saat ini sudah ada 10 (sepuluh) STP yang dikelola pemerintah daerah diantaranya 5 (lima) STP yang akan penulis bandingkan yaitu Cimahi Techno Park, Solo Techno Park, Sragen Techno Park, STP Sumatera Selatan dan Riau STP. Rata-rata masih mencari bentuk terhadap proses pengelolaan dan pengembangan STP. Bagaimana pola kelembagaan STP pemerintah daerah yang tepat sehingga dapat mempercepat inovasi teknologi melalui jaringan antara lembaga pendidikan, industri dan komunitas. Bahkan STP dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru serta potensi pendapatan pajak nasional tersebut (Seo, 2006). Oleh karena itu, perlu dirumuskan strategi pengembangan STP khususnya STP yang dikelola oleh pemerintah daerah.

## B. PEMBAHASAN

Hasil dari telaah pustaka terkait pengembangan *Science Techno Park* (STP) yang dikelola oleh pemerintah daerah akan penulis telaah dimulai dari penjabaran kondisi Cimahi Techno Park, Solo Techno Park, Sragen Techno Park, STP Sumatera Selatan dan Riau STP. Selanjutnya, akan ditelaah bagaimana strategi pengembangan STP pemerintah daerah di Indonesia.

### Kondisi STP Pemerintah Daerah

#### a. Cimahi Techno Park

Pengembangan STP Kota Cimahi yang disebut sebagai Cimahi Techno Park merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian (Disdagkoperind) Kota Cimahi. Tujuan didirikannya Cimahi Techno Park sebagai wahana pengembangan dan pemanfaatan

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi kreatif yang terdiri dari 16 (enam belas) sub sektor, yaitu: aplikasi dan *game developer*, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio.

Pembangunan STP di Cimahi menjadi hal yang penting bagi daerah dalam rangka mengembangkan, menyebarluaskan dan menciptakan pengusaha pemula. Terdapat produk-produk invensi yang masih berupa prototype yang perlu dikembangkan agar dapat diproduksi massal oleh industri (Tolinggi et al., 2018). Dari sini muncul tiga aktivitas utama, yaitu adanya kolaborasi riset, proses inkubasi dan *spin off* serta layanan teknologi.

### b. Solo Techno Park

Solo Techno Park pada awal pendirian secara struktural menjadi bagian dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bappeda Solo dikarenakan banyaknya kegiatan R&D namun pada tahun 2010 berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Perubahan dilakukan karena cakupan UPT kurang luas dan pengelolannya tidak fleksibel maka pola BLUD dianggap lebih fleksibel.

Dalam pengembangan Solo Tekno Park terdapat beberapa tantangan dalam pengembangannya, yaitu sulitnya menjalin kerjasama dengan industri dan menentukan tarif pelayanan. Selain itu, pola pikir bisnis berbeda dengan industri teknopark sebagai bagian dari pemerintah daerah. Sehingga keinginan untuk menempatkan posisi yang seimbang terhadap dunia industri dalam struktur Solo Techno Park masih sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari bentuk kelembagaan ini menawarkan solusi yang memberikan arah pengembangan Solo Teknopark sebagai unit penyedia layanan sumber daya manusia yang siap digunakan oleh industri khususnya yang telah bekerjasama sebelumnya (Nurasa et al., 2016).

### c. Sragen Techno Park

Sragen Techno Park yang diresmikan pada tahun 2009, memiliki beberapa program utama yang dilakukan untuk mengembangkan Sragen Techno Park, diantaranya program pelatihan yang berfokus pada penguasaan skill pengetahuan kerja yang mengacu pada standar kompetensi kerja (SKKNI, Standar Khusus dan Standar Internasional). Program lainnya yaitu inkubasi bisnis yang berfokus pada bidang teknologi. Sragen Techno Park memiliki konsep dengan fungsi One Stop Service Labor Market. Berbagai jenis pelatihan yang telah dijalankan di Sragen Techno Park adalah vokasi di bidang otomotif, vokasi teknologi mekanik las, vokasi industri tekstil, vokasi bangunan, vokasi listrik, vokasi mekanik logam dan vokasi tata niaga serta berbagai program-program lainnya (Bangsa, 2019).

### d. STP Sumatera Selatan

STP Sumatera Selatan merupakan revitalisasi Agrotecnopark (ATP) Palembang. ATP merupakan kawasan iptek yang dibangun dengan basis teknologi yang mengintegrasikan berbagai kegiatan pertanian, perikanan, peternakan dan pascapanen secara terpadu dan dikelola dengan *best management agriculture practices*. Kawasan ini berfungsi sebagai sarana percepatan alih teknologi hasil litbang (pemerintah, perguruan tinggi dan industri), pusat percontohan pertanian terpadu berbasis teknologi, dan pusat alih teknologi kepada masyarakat.

Prospek inovasi teknologi yang akan difasilitasi oleh STP antara lain rekayasa genetik bibit unggul ternak lokal, rekayasa rumen (ruminology), pakan berbasis sumberdaya lokal (*feed engineering*), teknologi rekayasa iklim mikro (*microclimate engineering*), serta inovasi pengelolaan hasil (*off farm*) dan management rantai pasok dingin (*cold supply chain*) (STP Sumatera Selatan, 2016).

Namun demikian, pengembangan STP Sumatera Selatan dihadapkan oleh berbagai tantangan diantaranya: (1) keterbatasan kapasitas investasi nasional di sektor hilir; (2) belum siapnya teknologi nasional untuk menyokong tumbuh kembang industri. Hal

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

ini terkait rendahnya adopsi hasil riset yang digunakan oleh industri (Sari & Retnaningsih, 2020).

### e. Riau Science Techno Park

STP Provinsi Riau berada dibawah Litbang Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) yang bertempat di Kabupaten Kampar. Pada saat ini, pengembangan Science Techno Park (STP) di Provinsi Riau ada di tiga Kabupaten seperti: Kabupaten Kampar, Pelalawan dan Siak. Di Kabupaten Kampar fokus pengembangannya pada bidang pangan khas Riau, diantaranya Sagu, Kelapa, Nenas dan Ikan. Kemudian Teknopolitan di Kabupaten Pelalawan fokus dibidang industri hilir Kelapa Sawit. Selanjutnya di Kabupaten Siak fokus pada pengembangan penyediaan Benih Padi, Hortikultura, dan Bibit Ternak.

STP ini mengembangkan berbagai produk yang dapat dijadikan sebagai produk unggulan, seperti fokus pada budidaya ikan menjadikan ikan patin dalam kaleng kemasan yang bertuliskan "Pindang Patin Khas Riau". Selain itu, ikan dapat dijadikan kerupuk, dan nenas dijadikan selai (Amriani & Prihatin, 2019).

Dalam pengembangannya Riau STP menghadapi beberapa hambatan diantaranya: (1) Lokasi yang cukup jauh dijangkau oleh masyarakat misalnya ketika menuju Pelelawan sehingga proses inkubasi sulit dilakukan, mengingat biaya transportasi menuju lokasi pun tinggi; (2) kurangnya kapasitas SDM sehingga harapan untuk dapat melakukan transfer teknologi dan menghilirisasi teknologi sangat sulit.

### Strategi Pengembangan STP

Dari perbandingan STP pemerintah daerah yang dilakukan, secara umum konsep STP yang perlu ada yaitu: (1) memiliki lahan, infrastruktur dan bangunan termasuk sharing peralatan dan lokasi yang strategis; (2) memiliki pengelola yang professional, mengetahui bagaimana mengelola STP, mampu memperluas dan menyediakan jaringan dan juga mampu mengelola financial STP untuk jangka panjang; (3) adanya sumber pengetahuan, penemuan dan pengembangan hasil riset yang berasal dari perguruan tinggi atau lembaga penelitian

dan pengemabngan (litbang) lainnya; (4) memiliki calon startup, perusahaan, termasuk tenant jangkar berbasis teknologi dan inovasi dalam STP; (5) memiliki inkubator bisnis untuk mendampingi produk inovatif tenant agar dapat terkomersialisasi; (6) memiliki industri baik sebagai tenant, angel investor ataupun yang memanfaatkan hasil riset (Arifin Muhammad et al., 2017).

Dari kelima STP yang dikelola oleh pemerintah daerah tersebut, ternyata rata-rata dalam prosesnya hanya melakukan pembinaan terhadap UKM atau pelatihan tenaga kerja sehingga belum memenuhi keseluruhan standar komponen dalam STP. Sehingga harapannya ketika ada inisiasi untuk membangun STP, legalitas STP baru dikeluarkan bila memang sudah memenuhi keenam komponen ini, bila belum lengkap lebih baik tetap menjadi lembaga pembinaan ukm atau sejenisnya.

Selain itu, proses pengembangan STP seringkali dihadapkan terkait mekanisme pengelolaan keuangan, karena pengembangan STP ini tidak mungkin hanya mengandalkan dana pemerintah sebagai aktor sentral namun memerlukan pendanaan dari berbagai pihak, untuk itu strategi pengelolaan bisa mencoba dengan mengadopsi konsep BLUD.

Konsep BLUD merupakan konsep pengelolaan bersama antara pemerintah, swasta, pengusaha, dan lembaga pendidikan. Biasanya terdapat beberapa direktur yang menjadi perwakilan dari masing-masing pihak yang akan bersama-sama mengelola kawasan yang akan didirikan, seperti yang terjadi di Solo Techno Park. Konsep ini mencoba memberikan alternatif dari setiap masalah pengelolaan yang diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah atau swasta. Keunggulan penerapan konsep ini mampu menutupi dua kendala, yaitu, birokrasi pemerintah yang rumit menyebabkan peluang bisnis dan peluang pengembangan bidang pendidikan tidak dapat berjalan dan ketidakmampuan swasta untuk mebiayan pembangunan daerah. Melalui mekanisme pengelolaan BLUD, maka BLUD mampu menutupi kedua kekurangan tersebut sehingga mendorong kolaborasi antar aktor

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

yang berbeda untuk bersama-sama mengembangkan daerah.

Adapun pola kerjasama yang terjadi antara masing-masing aktor dalam konsep ini yaitu terkait sistem pembiayaan yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat bekerja sama mencari peluang pendanaan daerah yang mana unsur bisnis harus dikembangkan. Namun, BLUD tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, namun harus mandiri dan menciptakan efisiensi biaya operasional. Dalam pelaksanaan kerjasama antar pihak, biasanya BLUD memiliki beberapa tantangan dalam penerapannya yaitu tantangan dalam menggabungkan kepentingan bersama antar pihak yang terlibat yang tentunya sebelum bekerjasama memiliki mekanisme kerja dan sistem administrasi yang berbeda seperti pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Selain itu dana yang tersedia dari APBD umumnya tidak mampu menutupi biaya rutin seperti gaji pegawai.

Strategi selanjutnya untuk mengembangkan STP pemerintah daerah adalah dengan melakukan kolaborasi terhadap aktor-aktor yang terlibat. Hal ini terlihat dari proses hilirisasi, *source of knowledge* masih sangat minim di lima STP milik pemerintah yang penulis amati. Padahal bila menilik dari fungsi awal didirikannya *Science Techno Park* (STP), yaitu sebagai wahana untuk melakukan kerjasama penelitian dan pengembangan berkelanjutan antara pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan serta industri. Namun, sinergi fungsi dan peran perguruan tinggi dan lembaga penelitian belum terjalin. Fungsi yang berjalan saat ini baru sebatas pada upaya mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh unsur perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah sedangkan tujuan pembentukan STP yaitu agar dapat menciptakan sinergi dan lingkungan yang kondusif dalam berlangsungnya kegiatan penelitian, pengembangan dan bisnis teknologi supaya berkelanjutan (Pemerintah Daerah Kota Cimahi, 2018).

Untuk itu STP pemerintah daerah perlu memfasilitasi inkubasi dan proses *spin off* perusahaan pemula, wahana kolaborasi R&D antar PT, lemlitbang dan industri serta menyediakan layanan teknologi lainnya dengan menarik industri ke dalam kawasan (Kemenristekdikti, 2015).

Pada konsepsi awal pola hubungan antar aktor dilakukan melalui model triple helix yang mana pemerintah daerah berperan dalam menyediakan tempat sebagai sarana pengembangan sumber daya masing-masing aktor yang sesuai dengan tujuan dari pemerintah. Institusi pendidikan maupun pusat riset berupaya menciptakan manfaat dengan adanya *transfer knowledge* dan teknologi serta optimalisasi sumber daya yang dimilikinya. Serta industri yang berperan dalam meningkatkan daya saing dalam penguatan jejaring.

Dari konsepsi *triplehelix* ini perlu juga memasukan unsur media dan masyarakat sehingga konsepsi berubah menjadi pentahelix. Dalam hal ini masyarakat melalui komunitas bisa berperan dalam menggerakkan dan mengakselerasi masyarakat yang terlibat dalam STP sedangkan media dapat berperan dalam melakukan promosi terkait STP beserta produk inovasinya.

Untuk itu STP perlu membentuk pola kolaborasi yang efektif yang mana di dalamnya harus ada: (1) pembagian tugas dan koordinasi yang jelas; (2) adanya kesepakatan antar aktor yang menghubungkan berbagai aspek proyek, seperti prospek perusahaan, pengembangan instalasi dan fasilitas, koordinasi, dan promosi; (3) mekanisme koordinasi dan kolaborasi harus dibentuk untuk mendorong kepercayaan antar aktor; (4) Adanya badan yang dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan para aktor yang terlibat; (5) pembuat kebijakan tidak boleh terlibat dalam asosiasi yang mana di dalam asosiasi akan dibentuk dewan direksi, mitra, pelaku ekonomi, keuangan dan akademisi yang masuk dalam asosiasi (badan) organisasi terkait; (6) setelah asosiasi/badan terbentuk dapat merekrut manajer yang memiliki kemampuan mengembangkan STP yang mana manajer harus dapat mengakomodir kepentingan publik dan swasta yang mana

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

seringkali kepentingan tersebut saling bertolak belakang (*Plan and Manage Science Park in the Mediterranean*, 2010).

### C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Pengembangan *Science Techno Park* (STP) merupakan suatu kawasan yang berhubungan dengan hilirisasi hasil riset dan teknologi yang tercipta dari proses kolaborasi antar aktor yang berkepentingan yang terdiri dari *Academia, Business, Government, Community* dan media. Pengembangan STP yang dikelola pemerintah daerah pada dasarnya memiliki potensi manfaat yang besar bagi pengembangan inovasi di daerah. Hanya saja perlu ada strategi pengembangan yang merujuk kepada mekanisme kelembagaan, keuangan dan kolaborasi yang jelas dan terpadu. Mekanisme ini perlu dikembangkan mengingat pengembangan STP pemerintah daerah tidak bisa hanya melibatkan pemerintah sebagai aktor sentral, pelibatan aktor secara *pentahelix* perlu dirumuskan dengan baik serta mekanisme pengaturan antara kepentingan publik dan bisnis harus selaras dan diatur dalam ketentuan antar aktor yang terlibat dalam pengembangan STP khususnya yang dikelola pemerintah daerah.

### REFERENSI

Amriani, R. F., & Prihatin, P. S. (2019). *Science Techno Park (STP): Pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Riau*. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.  
<https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/4342>

Arifin Muhammad, N., Muhyiddin, M., Faisal, A., & Angger Anindito, I. (2017). The Study of Development of Science and Technopark (STP) in Indonesia? *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 1(1).  
<https://doi.org/10.36574/jpp.v1i1.6>

Bangsa, R. (2019). *Identifikasi Tipologi Techno Park Dan Penilaian Techno Park Di Indonesia*. [elibrary.unikom.ac.id](http://elibrary.unikom.ac.id).  
<https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1948/>

International Association of Science Parks.

(2015). *The role of STPs and areas of innovation*. <https://www.iasp.ws/our-industry/The-role-of-STPs-and-areas-of-innovation>

Kemenristekdikti. (2015). *Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Taman Sains dan Teknologi (Science Technology Park)*. 1-34.  
<http://stp.ristekdikti.go.id/new/referensi/view/128#>

Nurasa, H., Ningrum, S., & Kartiwa, A. (2016). *Development Planning Science and Technology Park in Education Strategic Area Jatinangor: An initial study of the institutional forms and governance* Heru Nurasa. 1-17.

Pemerintah Daerah Kota Cimahi. (2018). *Peraturan Wali Kota Cimahi No 14 Tahun 2018 tentang Cimahi Technopark sebagai Kawasan Sains dan Teknologi*.

*Plan and Manage Science Park in the Mediterranean*. (2010).

Rosa, N. (2022). *Peringkat Indonesia di Indeks Inovasi Global, Lebih Tinggi dari Malaysia?* Detik.Com.  
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5965369/peringkat-indonesia-di-indeks-inovasi-global-lebih-tinggi-dari-malaysia>

Sari, N. M., & Retnaningsih, E. (2020). Strategi Pengembangan Science Techno Park Melalui Ekosistem Inovasi Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan*, 3(1), 1-20.  
<https://doi.org/10.46774/pptk.v12i1.14>

Seo, J.-H. (2006). *The Korean Techno-parks as the Hub of Sub-national Innovation System: Case of Daegu Techno-park*.

Soenarso, W. S., Nugraha, D., & Listyaningrum, E. (2013). Development of Science and Technology Park (STP) in Indonesia to Support Innovation-Based Regional Economy: Concept and Early Stage Development. *World Technopolis Review*, 2(1), 32-42.  
<https://doi.org/10.7165/wtr2013.2.1.32>

STP Sumatera Selatan. (2016).  
<https://litbangda.sumselprov.go.id/informasi/49>

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

Sujarwo. (2012). Peranan Riset Untuk Entrepreneurship Dalam Menghadapi Persaingan Global. *Peranan Riset Untuk Entrepreneurship Dalam Menghadapi Persaingan Global*, Prosiding Seminas Vol 1, No 2 (2012): Seminas Comp.

Tolinggi, W. K., Baruwadi, M., Murtisari, A., & Gubali, H. (2018). Stakeholder Analysis Management of Agro Zone

Pioneering Science Techno Park Province Gorontalo. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 3(10). [www.ijisrt.com](http://www.ijisrt.com)60

Wibowo, H. (2017). Konsep Pengelolaan, Fungsi, dan Aktivitas Science and Technology Park. *Direktorat HKI Dan Inovasi IPB*, 1-17.